

**PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT PADA BIRO
BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*



Oleh :

Reza Mindasari

NIM. 95826/2009

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

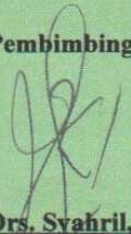
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT PADA BIRO BINA SOSIAL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT**

Nama : Reza Mindasari
NIM/BP : 95826/2009
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

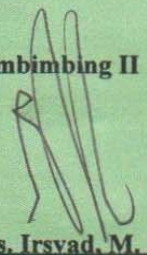
Padang, Mei 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Drs. Syahril, M.Pd
NIP. 19630424 198811 1 001

Pembimbing II


Drs. Irsyad, M. Pd
NIP. 19630630 199001 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian
Skripsi Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT PADA BIRO BINA SOSIAL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT

Nama : Reza Mindasari
NIM/BP : 95826/2009
Program studi : Manajemen Pendidikan
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Mei 2014

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syahril, M. Pd	1.....
Sekretaris	: Drs. Irsyad, M. Pd	2.....
Anggota	: Prof. Dr. Rusdinal, M. Pd	3.....
Anggota	: Dr. Rifma, M. Pd	4.....
Anggota	: Lusi Susanti, S.Pd, M. Pd	5.....

ABSTRAK

**Judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT PADA
BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATRA BARAT**

Penulis : Reza Mindasari
NIM/BP : 95826/2009
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Pembimbing : 1. Drs. Syahril, M.Pd
2. Dra. Irsyad, M.Pd

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan penulis di Biro Bina Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat yang menunjukkan kurangnya pelaksanaan pengawasan melekat oleh pimpinan terhadap bawahan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat yang ditinjau dari: 1) aspek-aspek yang diawasi, 2) proses pengawasan melekat, 3) teknik pengawasan, 4) waktu pengawasan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan melekat oleh pimpinan dalam tugas pegawai, yang ditinjau dari: 1) aspek-aspek yang diawasi, 2) proses pengawasan melekat, 3) teknik pengawasan, 4) waktu pengawasan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang jumlah pegawainya sebanyak 65 orang, dan teknik dalam menentukan sampel adalah *simple random sampling*, yang didapat adalah 56 orang dengan menggunakan rumus rata-rata (*mean*). Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket dalam bentuk skala *Likert* dengan alternatif jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), jarang (JR), dan tidak pernah (TP) yang telah diujicobakan validitas dan reliabilitasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditinjau dari : 1) aspek-aspek yang diawasi berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,40, 2) proses pengawasan melekat berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,45, 3) teknik pengawasan berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,39, 4) waktu pengawasan berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,42. Secara keseluruhan pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,41.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis aturkan kepada Allah SWT, yang maha besar, maha kaya, maha pemberi rezeki, maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga berkat ridho dan izin dari Allah SWT jua lah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat”.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini terlaksana berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
3. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan
4. Bapak Drs. Syahril, M.Pd sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Irsyad, M.Pd sebagai pembimbing II yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta pegawai Jurusan Administrasi Pendidikan yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta pegawai atas kerjasama dan bantuannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak dan ibunda serta saudara-saudara tercinta yang mendoakan, memberi nasehat, dorongan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Rekan-rekan angkatan 2009 yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Serta kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Jurusan Administrasi Pendidikan
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan skripsi ini

Semoga segala bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT, mudahkan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, sekolah tempat penelitian, dan Jurusan Administrasi Pendidikan serta pembaca pada umumnya.

Penulis telah berupaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari baik isi maupun penulisan masih belum sempurna untuk itu kepada pembaca, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Padang, April 2014

Reza Mindasari
NIM. 95826

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Pertanyaan Penelitian	5
F. Tujuan Penelitian	6
G. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Pengawasan dan Pengawasan Melekat	8
B. Tujuan Pengawasan Melekat.....	12
C. Prinsip-prinsip Pengawasan Melekat	14
D. Pelaksanaan Pengawasan Melekat oleh Pimpinan dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai.....	15
E. Kerangka Konseptual	24
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Defenisi Operasional Variabel	26
C. Populasi dan Sampel	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Instrumen Penelitian	29
F. Prosedur Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Populasi Pegawai pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	27
2. Pelaksanaan Pengawasan Melekat Ditinjau dari Aspek-Aspek yang Diawasi.....	35
3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat Ditinjau dari Proses Pengawasan Melekat.....	37
4. Pelaksanaan Pengawasan Melekat Ditinjau dari Teknik Pengawasan.....	39
5. Pelaksanaan Pengawasan Melekat Ditinjau dari Waktu Pengawasan.....	40
6. Rekapitulasi Skor Rata-Rata Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka konseptual.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	54
2. Surat Angket Penelitian.....	55
3. Petunjuk Pengisian Angket Penelitian	56
4. Angket Penelitian	57
5. Rekapitulasi Data Hasil Uji Coba	61
6. Uji Reliabilitas dan Validitas Angket Penelitian	62
7. Skor Mentah Hasil Penelitian	65
8. Tabel nilai r Product Moment	66
9. Tabel Krecjie	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen yang baik terdiri dari beberapa unsur, selain unsur perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, juga meliputi unsur pengawasan. Keempat unsur tersebut saling bersinergi untuk menuju tercapainya cita-cita suatu institusi. Mengawasi pada dasarnya adalah mengawasi semua apa yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diarahkan, tanpa pengawasan yang baik terhadap ketiga unsur manajemen semua usaha akan sulit mencapai efektivitas tujuan. Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program atau kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana pengawasan hanya sekedar meraba-raba terhadap hal-hal yang diawasi. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang.

Pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. Pada umumnya pengawasan terdiri dari tiga langkah yaitu menentukan standar, mengukur hasil atas dasar standard dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan landasan fungsional bagi setiap pejabat negara untuk menempati posisi pimpinan dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang terendah. Berdasarkan landasan fungsional yang seperti itu berarti bahwa kewenangan pengawasan berada pada pejabat pimpinan, baik pejabat pimpinan struktural sebagai atasan terhadap bawahan, maupun pejabat pimpinan sesuai dengan bidang tugas substansi yang dipimpinnya.

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada jabatan pemimpin sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut harus ada kerja sama antara pimpinan dan bawahan. Pada dasarnya pegawai merupakan sumber daya manusia yang terpenting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Agar tujuan dapat dicapai maka diperlukan pengawasan yang disebut dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, sehingga jika terjadi kesalahan maka dapat dikoreksi secara dini yang dapat dilanjutkan dengan melakukan tindakan perbaikan. Di samping pengawasan melekat itu dilakukan pimpinan maka pegawai tersebut harus bisa menunjukkan tingkat disiplin yang baik terhadap atasannya.

Pengawasan melekat adalah sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan kerja masing-masing. Dalam kenyataannya, setiap pimpinan

organisasi atau unit kerja akan selalu ingin berusaha mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup tanggung jawabnya.

Dalam kenyataannya masalah-masalah yang sering ditemui masih ada pimpinan yang kurang bisa menegur bawahannya dengan alasan yang bermacam-macam seperti takut tidak disenangi bawahan, atau mungkin pimpinan banyak memiliki kelemahan yang diketahui oleh bawahan. Masalah yang timbul bukan hanya dari pimpinan, namun dari bawahan yang kurang ingin diawasi, kurang senang untuk ditegur, namun ini hanya faktor *ekstern* saja, hal yang primer adalah faktor intern yaitu kualitas pemimpin itu sendiri

Hal lain juga berusaha mengetahui apakah semua kegiatan sudah berlangsung sesuai dengan prosedur kerja yang diberikan oleh pimpinan terhadap bawahannya disamping oleh aparat pengawasan perencanaan, peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan sebelumnya. Untuk itu setiap pemimpin harus melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh bawahannya. Dengan demikian adanya penyelewengan dapat dikurangi atau bahkan dicegah, karena jika tidak penyimpangan yang dilakukan bawahan dari satuan kerja atau organisasi dapat menghambat pembangunan dan dengan pengawasan dapat diperoleh manfaat yang besar atas sumberdaya, dana dan waktu .

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap pegawai yang bekerja di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, didapatkan informasi bahwa :

1. Belum adanya aspek yang dinilai pada pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya.
2. Belum adanya proses pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya
3. Belum adanya teknik pengukuran pada pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya.
4. Belum adanya waktu penilaian pada pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terlihat adanya permasalahan yang kurang baik terhadap pelaksanaan pengawasan dari pimpinan terhadap bawahan adalah :

1. Pimpinan belum mempunyai aspek yang dinilai pada pengawasan melekat terhadap pegawainya.
2. Pimpinan belum melakukan proses pengawasan melekat yang dilakukan terhadap pegawai biro bina sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat.
3. Pimpinan belum mempunyai teknik pengukuran yang digunakan pada pengawasan melekat terhadap pegawainya.

4. Pimpinan belum mempunyai waktu penilaian pada pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya.

C. Batasan Masalah

Dari uraian diatas dilihat dari tugas pegawai yang cukup banyak, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan dan organisasi yang dipimpin agar hasil yang diharapkan tercapai dengan baik. Sebab pengawasan dari pimpinan sangat mempengaruhi pegawai untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Mengingat luasnya ruang lingkup tersebut, penulis membatasi masalah penelitian tentang pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi :

1. Aspek yang diawasi
2. Proses pengawasan
3. Teknik pengawasan
4. Waktu pengawasan

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas maka dapat dibuat suatu perumusan masalahnya yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat ?

E. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat dibuat suatu pertanyaan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterlaksanaan aspek yang dinilai oleh pimpinan terhadap pegawai Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sumatra Barat ?
2. Bagaimanakah keterlaksanaan proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawai Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat ?
3. Bagaimanakah keterlaksanaan teknik pengawasan melekat yang digunakan pimpinan terhadap pegawai Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat ?
4. Bagaimanakah keterlaksanaan waktu yang digunakan oleh pimpinan dalam mengawasi pegawai Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pengawasan melekat oleh pimpinan dalam pelaksanaan tugas pegawai yang berhubungan dengan :.

1. Aspek yang diawasi dalam pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat.
2. Proses pengawasan melekat oleh pimpinan di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat
3. Teknik pengawasan yang digunakan pada pengawasan melekat Biro Bina Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat.
4. Waktu pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait dalam suatu organisasi, secara rinci peneliti ini dapat berguna :

1. Bagi kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat, sebagai bahan informasi dan masukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan pengawasan melekat oleh pimpinan dalam pelaksanaan tugas pegawai.
2. Bagi pegawai Biro Bina Sosial, sebagai bahan informasi akan pentingnya pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas pegawai.
3. Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pengawasan dan Pengawasan melekat

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan

merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Sementara Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas -tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun.

Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas - tugas organisasi.

Jadi pengawasan menurut Mocler dalam Engkoswara (2010:219) adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi.

Pimpinan dapat diartikan Atasan Langsung atau disebut juga pejabat yang karena struktur organisasinya atau kewenangan khususnya termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahan. Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa fungsi pengawasan melekat merupakan salah satu aspek kepemimpinan yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, dalam memberikan tugas atau tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, agar arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan tugas atau tanggungjawab tersebut tidak menyimpang dan selesai sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan melekat yang dimaksud tentu bermakna luas dan menjadi bagian integral dari konsep dan gaya kepemimpinan seseorang.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Waskat adalah “serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pengawasan melekat dimaksudkan dalam ayat (1) menurut Sujamto (2006:13) yaitu :

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas
- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima wewenang dari atasan

- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya
- d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan
- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengolahan keuangan
- f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya

Jadi pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas pegawai berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan perundangan yang berlaku.

Pengawasan melekat pada hakikatnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan melekat yang dilakukan sesungguhnya merupakan pengawasan yang berasal dari dalam diri organisasi yang bersangkutan namun memiliki sifat yang dominan dan sangat menentukan mengingat kedudukan pimpinan yang menentukan jalannya mekanisme birokrasi yang bersangkutan.

Pengawasan melekat merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan suatu instansi atau pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik. Keberhasilan pengawasan melekat pada akhirnya akan menyebabkan berkembangnya budaya dan tata kerja dalam aparaturnya pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan yang bersifat pengendalian secara terus-menerus sehingga bisa meminimalisir pentipangan yang dilakukan oleh bawahan tersebut.

B. Tujuan Pengawasan Melekat

Secara umum pengawasan bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan ..

Tujuan yang paling utama dari pelaksanaan pengawasan melekat ini yaitu agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan sesuai dengan

perencanaan yang dibuat, mencegah terjadinya penyimpangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat bertujuan supaya atasan secara langsung dapat mengetahui kegiatan nyata setiap aspek dan permasalahan yang dihadapi bawahan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga secara langsung dapat mengambil tindakan nyata dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai.

Menurut Fattah dalam Engkoswara (2010:221) tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem, artinya melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dan program, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaannya serta evaluasinya senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan.

Sedangkan tujuan pengawasan melekat menurut Hadari Nawawi (1998:26) yaitu tidak berakhir pada diperolehnya temuan temuan oleh atasan langsung dari hasil pemantauan, pemeriksaan atau evaluasinya terhadap bawahannya. Temuan-temuan itu hanya akan bermanfaat bagi tujuan pengawasan melekat bilamana diiringi dengan tindak lanjut oleh atasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat bertujuan supaya atasan secara langsung dapat mengetahui kegiatan nyata setiap aspek dan permasalahan yang dihadapi bawahan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga secara langsung dapat mengambil tindakan nyata dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai.

C. Prinsip-prinsip Pengawasan Melekat

Prinsip-prinsip pengawasan melekat meliputi:

1. Pengawasan melekat pada dasarnya dilakukan secara berjenjang, namun demikian setiap pimpinan pada saat-saat tertentu dapat melakukan pengawasan melekat pada setiap jenjang yang di bawahnya.
2. Pengawasan melekat harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan tidak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.
3. Pengawasan melekat lebih diarahkan pada pencegahan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya petunjuk yang jelas yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam pelaksanaan fungsi manajemen perlu dilakukan pengawasan melekat untuk menjamin agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Berbagai kegiatan pelaksanaan memerlukan pula pengawasan dalam rangka penyempurnaan perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan itu sendiri. Lebih dari itu, halnya pengawasan juga dipergunakan untuk menyempurnakan system pengawasan.
4. Pengawasan melekat harus bersifat membina. Oleh karena itu, kriteria adanya penyimpangan harus di dasarkan pada kriteria yang jelas dan penyimpangan tersebut harus dideteksi secara dini. Tindak lanjut terhadap temuan-temuan dalam pengawasan melekat harus:

- a) Dilakukan secara tetap dan tertib.
- b) Didasarkan pada penilaian yang objektif melalui analisis yang cermat sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tindak lanjut yang berupa penghargaan bagi bawahan yang berprestasi.

D. Pelaksanaan Pengawasan Melekat oleh Pimpinan dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai

Pengawasan melekat bertujuan supaya atasan secara langsung dapat mengetahui kegiatan nyata setiap aspek dan permasalahan yang dihadapi bawahan dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aspek yang diawasi Pimpinan

Pelaksanaan pengawasan pimpinan harus memperhatikan aspek-aspek yang akan diawasi, supaya pimpinan tersebut dapat membimbing dan mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut Nurdin yang dikutip oleh Mukmin (2008:10) mengemukakan aspek-aspek yang diawasi adalah :

- a) Orang sebagai pelaksana kegiatan
- b) Uang atau dana sebagai alat pembiayaan untuk terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
- c) Fasilitas yang merupakan perlengkapan yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- d) Hasil kegiatan yaitu menilai apakah dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana

Berdasarkan penjelasan diatas maka aspek-aspek yang diawasi dan dinilai adalah :

a) Pegawai dalam melaksanakan kegiatan

Pengawasan dibidang manusia atau pegawai dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja.

b) Penggunaan dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang keuangan ditujukan pada pengawasan aliran dana yang digunakan apakah sudah sesuai atau tidak.

c) Penggunaan material untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan dibidang material ditujukan agar material dapat digunakan seefektif mungkin.

d) Mutu atau hasil kegiatan dari pengawasan dapat ditujukan terhadap kualitas hasil produksi dari sebuah kebijakan yang diambil.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengawasan melekat tidak dapat terlepas dari pendayagunaan sistem prestasi dan sistem karir, untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi dari kelima sumber kerja tersebut di atas. Pendayagunaan kelima sumber kerja itu secara efektif dan efisien tergantung sepenuhnya pada manusia.

2. Proses dari Pengawasan Melekat

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari berbagai tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua

pengawasan manajerial. Proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2009:362) adalah :

- a. Penetapan standar pelaksanaan
- b. Penentuan pengukuran kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan
- e. Pengambilan tindakan korektif bila perlu

1. Tahap 1 : Penetapan standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. *Standar* mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Tahap 2 : Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat

3. Tahap 3 : Pengukuran Pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

4. Tahap 4 : Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan

5. Tahap 5 : pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan

Jadi secara umum dapat disimpulkan proses pengawasan meliputi menetapkan standar, mengadakan evaluasi atau penilaian dan melaksanakan tindak lanjut. Berikut penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

a) Menetapkan standar

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa. Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Standar harus ditetapkan secara akurat sebelum pegawai melaksanakan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan nantinya berjalan dengan lancar.

b) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah penentuan standar dilakukan maka langkah kedua yang dilakukan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan

dicapai. Mengukur adalah tindakan untuk mengetahui atau memastikan pekerjaan atau hasil yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan dan dicapai”. Menurut Handoko (2000:364) ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu “1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan baik lisan dan tertulis, 3) metode-metode otomatis, 4) inspeksi pengujian (test)”.

c) Mengadakan evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan selanjutnya. Menilai dimaksudkan adalah membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur atau standar yang sudah ditentukan .

Jika evaluasi dalam pengawasan pimpinan adalah mengadakan penilaian terhadap kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya, apakah terdapat penyimpangan, kesalahan-kesalahan, atau mungkin terjadi peningkatan dalam bekerja.

d) Mengadakan tindak lanjut

Tujuan pengawasan tidak berakhir begitu saja tanpa adanya tindak lanjut dari atasan langsung, dari hasil pemantauan, pemeriksaan atau evaluasi terhadap bawahannya. Seluruh temua itu hanya bermanfaat apabila ada tindak lanjut . Kegiatan pengawasan hanya mempunyai arti yang kecil kecuali diambil tindakan koreksi”.

Tindak lanjut atau perbaikan pada dasarnya dimaksudkan agar apa yang dilaksanakan pegawai dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa tindakan-tindakan perbaikan atau tindak lanjut berfokus untuk memperbaiki kekurangan yang ada baik itu pada kemampuan pegawainya, sikap pegawainya, mental pegawainya, ataupun perlengkapan yang digunakan.

3. Teknik – Teknik Pengawasan Melekat

Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi.

Teknik pengawasan ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu :

- a) Teknik langsung yang dijalankan sendiri oleh atasan/pimpinan dalam memeriksa kegiatan yang telah berjalan.
- b) Teknik tidak langsung, jadi pengawasan itu diawasi melakukan perantara, baik secara lisan maupun berbentuk laporan.

Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inpektif, verifikatif, maupun sistem investigasi sedangkan pengawasan tidak langsung ialah aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan jalan

langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan sehingga pimpinan dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dan bila perlu pimpinan dapat langsung memberikan petunjuk-petunjuk untuk memperlancar jalannya kegiatan, sedangkan teknik pengawasan tidak langsung dapat dilihat berupa laporan.

4. Waktu penilaian pengawasan

Dari pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung dapat diketahui *lamanya* atau *jangka waktu* yang digunakan bawahan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Semakin lama waktu yang diperlukan, menunjukkan semakin rendah efektivitas dan efisiensi kerja, dibandingkan dengan yang menggunakan waktu tidak terlalu lama, sedang hasil kerja yang dicapai sama atau lebih baik. Semakin hemat penggunaan waktu dengan memperoleh hasil yang maksimal berarti semakin tinggi produktivitas kerja, yang menggambarkan juga semakin tinggi efektivitas dan efisiensi kerja bawahan

Penggunaan waktu merupakan salah satu cara dalam melaksanakan pengawasan melekat oleh pimpinan. Pada umumnya pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemikiran atas dasar diri sendiri, pimpinan pergi sendiri ke tempat dimana pegawai melakukan aktifitas dan tugasnya masing-masing.

a) Rutinitas

Rutinitas asal katanya rutin yaitu prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Sedangkan rutinitas adalah suatu langkah-langkah atau

tahapan – tahapan pada suatu program (aktivitas / kegiatan tertentu)
 pada suatu program yang telah dirancang untuk mencapai program,
 yang dilakukan secara teratur, tidak berubah – rubah

Jadi dapat diartikan bahwa rutinitas pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara teratur dan tidak berubah – ubah. Dalam hal ini pimpinan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai yang bekerja secara teratur dan tidak berubah – rubah berdasarkan program yang telah dirancang untuk mencapai program.

b) Lamanya waktu pengawasan

- Melalui laporan lisan yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan masing-masing kepala Biro dengan mengadakan wawancara. Pertemuan ini biasanya dilakukan pada awal bulan.
- Menggunakan laporan tulisan

Hal ini ditempuh demi memudahkan dalam pengarsipan proses-prose kinerja pegawai. Laporan tertulis juga dapat membantu pimpinan, laporan ini diminta satu kali dalam seminggu dan diminta kepada Kabag di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat. Kecepatan dalam menyelesaikan tugas merupakan salah satu kriteria untuk melihat kinerja seseorang.

Apabila seorang pegawai mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan bisa menentukan kinerja yang dihasilkannya. Seorang pegawai yang berkinerja baik ia akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan. Jadi kinerja seorang pegawai salah satu halnya dapat dilihat dari penggunaan waktu dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas.

c) Frekuensi

Pengawasan harus dilakukan dengan frekuensi yang berkala. pengawasan yang dilakukan hanya sekali bisa dikatakan bukan pengawasan yang baik, karena organisasi/lingkungan selalu berkembang. Oleh sebab itu agar organisasi selalu dapat mengikuti berbagai perkembangan dan perubahan, perlu dilakukan berbagai penyesuaian. Pengawasan dapat membantu penyesuaian tersebut yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan bawahan.

A. Terjadwal

Pengawasan terjadwal adalah pengawasan yang dilakukan secara teratur atau berkala. Pelaksanaan pengawasan telah diatur berdasarkan jadwal tertentu. Pengawasan yang dilakukan hanya sekali bukan pengawasan yang baik.

B. Pengawasan Insidentil

Nuswantorotejo (2013) bahwa pengawasan insidentil adalah pengawasan dengan cara pemeriksaan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada tersangkanya /pelakunya.

Pengawasan insidentil adalah pengawasan yang dilakukan karena adanya kasus atau masalah tertentu. Pengawasan ini

dilakukan karena adanya masalah kedinasan yang memiliki dampak terhadap pelaksanaan program. Pengawasan insidentil ini dilakukan untuk mencegah dan membatasi timbulnya akibat – akibat sampingan yang tidak diinginkan.

C. Pengawasan Terus menerus

Pengawasan terus menerus adalah pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

E. Kerangka Konseptual

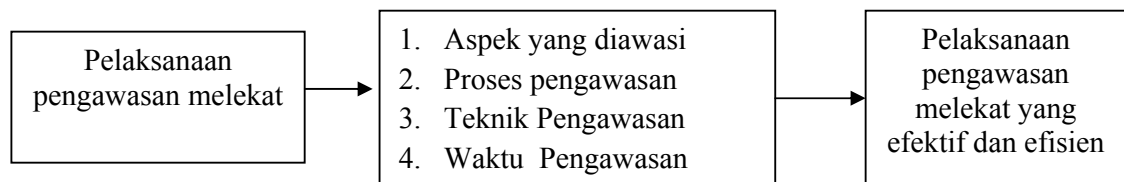
Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori merupakan kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang ditemui.

Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka mengawasi kinerja anggotanya melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaannya terdapat enam sasaran yang diawasi yaitu organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatan dan pelaporan, pembinaan personi/pegawai. Teknik pengawasannya dilakukan dengan cara pemantauan formal dan pemantaun informal yang masing-masing bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pegawai. Disamping teknik yang dilakukan dalam mengawas terdapat proses yang dilakukan yakni

menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, menemukan kebutuhan tindakan korektif.

Setiap organisasi dalam melaksanakan pengawasan melekat harus mengetahui secara tepat sasaran pokok yang hendak dicapai oleh organisasi, terutama dalam melaksanakan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dalam hal ini terdapat aspek yang akan dilaksanakan dalam pengawasan adalah sasaran dalam melaksanakan pengawasan melekat, teknik-teknik yang dipakai dalam pengawasan melekat, dan proses dari pengawasan melekat yang dilaksanakan pada Biro Bina Sosial.

Jadi sesuai dengan teori yang telah dikemukakan, sebagai acuan penulis menggambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.
Pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial di Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatra Bara

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum skor rata-rata pelaksanaan pengawasn melekat ditinjau dari aspek-aspek yang diawasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,40). Ini berarti pelaksanaan pengawasan ditinjau dari aspek yang diawasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat sudah dilaksanakan dengan **Cukup Baik**.
2. Secara umum skor rata-rata pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari proses pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretrariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,45). Ini berarti pelaksanaan pengawasan ditinjau dari proses pengawasan di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat sudah dilaksanakan dengan **Cukup Baik**.
3. Secara umum skor rata-rata pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari teknik pengawasan di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,39). Ini berarti pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari teknik penawasan di Biro Bina sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra sudah dilaksanakan dengan **Cukup Baik**.

4. Secara umum skor rata-rata pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari waktu pengawasan di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,42). Ini berarti pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari waktu pengawasan di Biro Bina sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra sudah dilaksanakan dengan **Cukup Baik**.
5. Rekapitulasi pelaksanaan Pengawasan melekat di Biro Bina Sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat dilihat dari aspek yang diawasi, proses pengawasan, teknik pengawasan, dan waktu pengawasan oleh Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan **Cukup Baik** (3,41).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Bina Sosial Provinsi Sumatra Barat
 - a. Pimpinan hendaknya dapat memberikan informasi-informasi kepada pegawai
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan pengawasan melekat dengan lebih baik lagi terutama dalam hal teknik pengawasan untuk ditingkatkan supaya pelaksanaan pengawasan melekat berjalan

sesuai dengan tujuann yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien.

- c. Pimpinan seharusnya dapat membuat pihak yang diawasi merasa terbantu hingga dapat mencapai visi dan misi
- d. Pimpinan dapat menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas
- e. Pimpinan dapat menciptakan suasana saling percaya dalam dan luar lingkungan

2. Pegawai Biro Bina Sosial

- a. Pegawai hendaknya mendukung pimpinan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan melekat dan melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Bagi pegawai Biro Bina Sosial sebagai acuan untuk melakukan kegiatan agar lebih baik lagi.
- c. Bagi pegawai pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- d. Dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
Jakarta

Arikunto.Suharsimi.2010.*Prosedur Penelitian*.Jakarta.Rineka Cipta.

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi Universitas Negeri Padang

Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung : Alfabeta

Engkoswara,dkk. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Handoko, Hani 2000. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta : BPFE

Nasution.MA. 2011. *Metode research penelitian ilmiah*. Jakarta : Alfabeta

Nawawi, Hadari, 1992. *Manajemen Personalia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Nawawi, Hadari, 1998. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*.
Jakarta : Erlangga

Mukmin, Tasrif. 2008. Hubungan Pengawasan Pimpinan Dengan Pelaksanaan Tugas
Pegawai Dinas Koperasi PKM Provins Sumatra Barat.

Sujamto. 2006. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar .Jakarta. Sinar Grafika

Suwatno.2002.*Manajemen SDM alam Organisasi Publik dan
Bisnis*.Bandung.Alfabeta

Usman, Husaini. 2012. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset*